

**Feti Fatonah<sup>1</sup>**  
**Bagas Arib**  
**Nuriansyah<sup>2</sup>**  
**Chintya Permatasari<sup>3</sup>**  
**Cokorda Dwija**  
**Wisnuardana<sup>4</sup>**  
**Elizabeth Rindi**  
**Novitri<sup>5</sup>**  
**Gede Arda Wedana**  
**Prasetya<sup>6</sup>**  
**Havan Hakim Praja<sup>7</sup>**

## **PERAN PEMERINTAH DAN TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP JUMLAH TRANSPORTASI UDARA PENGGUNA**

### **Abstrak**

Transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarpulau di Indonesia. Namun, keterjangkauan harga tiket pesawat masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengendalikan tarif angkutan udara serta kaitannya dengan kemampuan membayar (Ability to Pay) dan kemauan membayar (Willingness to Pay) masyarakat terhadap penggunaan transportasi udara. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh data kuesioner yang disebarluaskan kepada 30 taruna/i Politeknik Penerbangan Indonesia Curug asal Bali yang rutin menggunakan rute Jakarta–Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami adanya kebijakan tarif batas atas dan bawah dari pemerintah. Namun, harga tiket pada periode tertentu masih dirasa mahal. Kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berperan penting dalam keputusan menggunakan pesawat, meskipun efisiensi waktu tetap menjadikan transportasi udara sebagai pilihan utama. Kesimpulannya, diperlukan kebijakan tarif yang lebih adaptif serta dukungan subsidi pada rute strategis guna meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan penerbangan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ability To Pay, Keterjangkauan Tiket, Regulasi Pemerintah, Tarif Pesawat, Transportasi Udara, Willingness To Pay

### **Abstract**

Air transportation plays a crucial role in supporting inter-island connectivity in Indonesia. However, the affordability of airline ticket prices remains a challenge for a significant portion of the population, particularly those from lower-middle-income backgrounds. This study aims to analyze the government's role in regulating airfares and its relation to the public's Ability to Pay (ATP) and Willingness to Pay (WTP) for air travel. A qualitative approach through literature review was employed, supported by questionnaire data collected from 30 cadets of the Indonesian Aviation Polytechnic Curug who regularly travel the Jakarta–Denpasar route. The findings indicate that most respondents are aware of government-imposed upper and lower fare limits. Nevertheless, ticket prices during peak periods are still perceived as expensive. Both ATP and WTP significantly influence decisions to use air transport, although time efficiency continues to make air travel the preferred option. In conclusion, more adaptive pricing policies and

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8)</sup>Program Studi Teknik Navigasi Udara, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

email: Feti\_fatonah@yahoo.co.id, 16032110007@ppicurug.ac.id, 16032110008@ppicurug.ac.id, 16032110009@ppicurug.ac.id, 16032110010@ppicurug.ac.id, 16032110011@ppicurug.ac.id, 16032110012@ppicurug.ac.id

government subsidies for strategic routes are needed to enhance accessibility and ensure equitable air transport services across Indonesia.

**Keywords:** Ability To Pay, Air Transportation, Airfare Regulation, Aviation Subsidy, Willingness To Pay

## PENDAHULUAN

Transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi vital di Indonesia, terutama mengingat kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Moda ini tidak hanya mempercepat mobilitas antarwilayah tetapi juga menjadi penunjang utama pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan integrasi nasional. Dalam satu dekade terakhir, sektor ini menunjukkan pertumbuhan signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah penumpang meningkat dari 82,1 juta pada tahun 2014 menjadi 95,1 juta pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan sekitar 15,83%.<sup>[1]</sup>

Meskipun pertumbuhan sektor transportasi udara cukup pesat, terdapat tantangan terkait keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat. Penelitian oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) menunjukkan bahwa kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli tiket pesawat domestik berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.<sup>[2]</sup> Namun, pada rute tertentu seperti Jakarta-Medan, harga tiket dapat mencapai Rp 2,8 juta, yang melebihi kemampuan dan kemauan sebagian masyarakat.<sup>[3]</sup>

Studi lain oleh Sukardi et al. (2022) di rute Kepulauan Sula–Ternate menemukan bahwa rata-rata kemampuan membayar (Ability to Pay/ATP) masyarakat adalah Rp 350.000, sementara kemauan membayar (Willingness to Pay/WTP) sebesar Rp 347.167.<sup>[4]</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harga tiket yang ditawarkan dengan daya beli masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengintervensi pasar transportasi udara melalui regulasi tarif, subsidi, dan pengembangan infrastruktur. Implementasi regulasi yang sesuai dengan standar internasional, seperti yang diatur oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), juga menjadi fokus dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penerbangan.<sup>[5]</sup>

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kondisi daya beli masyarakat terhadap aksesibilitas transportasi udara.<sup>[6]</sup> Terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana peran pemerintah melalui kebijakan regulasi dan subsidi dapat mempengaruhi keterjangkauan tiket serta bagaimana kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membayar tiket pesawat berpengaruh terhadap keputusan menggunakan transportasi udara.<sup>[7]</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara peran pemerintah, kemampuan serta kemauan masyarakat, dengan jumlah pengguna transportasi udara di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan regulasi yang diterapkan pemerintah mempengaruhi keterjangkauan dan penggunaan transportasi udara oleh masyarakat.<sup>[8]</sup> Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membeli tiket pesawat, serta melihat sejauh mana kedua aspek tersebut mempengaruhi jumlah pengguna transportasi udara di berbagai wilayah di Indonesia.

### 1. Regulasi Pemerintah dalam Transportasi Udara

Regulasi pemerintah dalam sektor transportasi udara bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi pasar. Menurut Tretheway dan Markhvida (2014), intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan aksesibilitas serta keselamatan dalam layanan transportasi udara. Regulasi ini mencakup penetapan tarif batas atas dan bawah, subsidi untuk rute perintis, serta pengembangan infrastruktur bandara.<sup>[9]</sup> Di Indonesia, regulasi yang mengatur terkait ini yaitu KM 106 Tahun 2019 tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri,<sup>[10]</sup> serta PM 20 tahun 2019 tentang tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.<sup>[11]</sup> Selain itu, dalam konteks internasional, kebijakan dan regulasi transportasi udara harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti International Civil Aviation Organization (ICAO). Hal ini penting untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi dalam operasional penerbangan.<sup>[12]</sup>

2. Kemampuan dan Kemauan Membayar (Ability to Pay dan Willingness to Pay)

Konsep Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) digunakan untuk mengukur keterjangkauan dan preferensi konsumen terhadap harga layanan transportasi.[13] Ability to Pay (ATP) merujuk pada kemampuan finansial individu atau rumah tangga untuk membayar suatu layanan atau produk, dalam hal ini layanan transportasi. ATP sering dihitung berdasarkan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk transportasi dan frekuensi penggunaan layanan tersebut.[14] Metode yang umum digunakan untuk mengukur ATP adalah metode Household Budget, di mana pengeluaran rumah tangga untuk transportasi dibandingkan dengan total pendapatan. sedangkan WTP adalah jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh individu untuk memperoleh suatu layanan atau produk, mencerminkan nilai subjektif atau persepsi terhadap manfaat layanan tersebut. WTP sering diukur menggunakan metode Stated Preference atau Contingent Valuation Method (CVM), di mana responden ditanya langsung mengenai kesediaan mereka untuk membayar sejumlah tertentu untuk layanan yang ditawarkan bahwa WTP dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas layanan, utilitas pengguna, dan pendapatan.[15]

Hubungan antara ATP dan WTP ini penting dalam menentukan tarif layanan yang optimal. Jika WTP lebih rendah dari ATP, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna mampu membayar, mereka tidak bersedia membayar lebih tanpa peningkatan kualitas layanan. Sebaliknya, jika WTP lebih tinggi dari ATP, ini bisa mengindikasikan bahwa pengguna menghargai layanan tersebut lebih tinggi dari kemampuan finansial mereka, yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian subsidi atau penyesuaian tarif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber literatur ilmiah, seperti jurnal-jurnal akademik, artikel penelitian terdahulu, buku referensi, dan dokumen kebijakan yang relevan.[20] Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data primer dari narasumber langsung, melainkan memanfaatkan informasi yang sudah tersedia untuk menganalisis hubungan antara variabel peran pemerintah dalam regulasi, kemampuan dan keinginan membayar masyarakat (Ability to Pay dan Willingness to Pay), serta dampaknya terhadap jumlah pengguna transportasi udara.

Data dikumpulkan melalui penelusuran artikel dari berbagai repositori ilmiah nasional dan internasional, seperti Google Scholar. Artikel yang dikaji kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggali hubungan antarkonsep dan kecenderungan umum dari berbagai temuan sebelumnya. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman konseptual dan menemukan pola hubungan antar variabel tanpa melakukan pengukuran statistik kuantitatif. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan dasar teoritik yang kuat bagi penelitian selanjutnya maupun kebijakan yang relevan dalam bidang transportasi udara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran pemerintah dalam mengendalikan harga tiket pesawat dan bagaimana tingkat pendapatan masyarakat memengaruhi jumlah pengguna transportasi udara. Hasil analisa terkait penelitian terdahulu, yaitu:

Judul	Hasil Penelitian
Analisis Tarif Pesawat Rute Banda Aceh – Jakarta Berdasarkan Total Operating Cost, Ability To Pay dan Willingness To Pay[16]	ATP tertinggi Rp3.279.000 (Batik Air), WTP tertinggi Rp1.653.000, TOC LCC Rp1.263.000, TOC full service Rp1.556.000.
Analisis Keterjangkauan Daya Beli Pengguna Jasa Transportasi Udara Untuk Rute Dari Kabupaten Kepulauan Sula Ke Kota Ternate[4]	ATP Rp350.000, WTP Rp347.167, tarif berlaku Rp650.000; pengguna dalam kondisi choiced riders
Analisis Penentuan Tarif Jasa	Karakteristik responden Jasa Transportasi Bandar

Transportasi Udara Rute Kediri - Jakarta di Bandar Udara Kediri[17]	Udara Kediri pada usia rata-rata 21-30 tahun dengan nilai ATP lebih kecil dari nilai WTP
Analisis Rencana Tarif Angkutan Umum Kereta Api Bandara Berdasarkan Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP)[18]	Menentukan rencana tarif KA Bandara Adi Soemarmo – Solo Balapan berdasarkan ATP dan WTP pengguna jasa dengan perhitungan ATP dan WTP dari hasil survei penumpang pesawat di bandara.
Analysis Ability To Pay And Willingness To Pay For Low Cost Carrier (LCC) Airlines (Case Study: Flight Jakarta to Surabaya With Citilink And Sriwijaya Airlines)[19]	Rata-rata Ability to Pay (ATP) penumpang adalah Rp683.875 dan Willingness to Pay (WTP) Rp597.694. Terdapat hubungan positif antara pendapatan dan WTP. ATP lebih tinggi dari WTP, menunjukkan adanya gap antara kemampuan dan kemauan membayar

Berdasarkan kajian pustaka terhadap sejumlah penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kemampuan membayar (ATP) masyarakat umumnya lebih tinggi daripada kemauan membayar (WTP), menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mampu membayar, mereka belum tentu bersedia mengeluarkan biaya tinggi tanpa adanya peningkatan kualitas layanan. Ketidaksesuaian antara tarif aktual dengan ATP dan WTP, seperti pada rute Kepulauan Sula–Ternate dan Kediri–Jakarta, menyebabkan sebagian pengguna menjadi choiced riders yang terpaksa menggunakan pesawat karena tidak memiliki alternatif lain. Faktor usia, pendapatan, dan kondisi sosial-ekonomi juga memengaruhi nilai ATP dan WTP, di mana kelompok usia produktif sering kali memiliki WTP yang tinggi meskipun daya belinya terbatas. Penelitian juga menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan WTP, namun tetap terdapat gap antara nilai ATP dan WTP. Secara keseluruhan, penyesuaian tarif transportasi udara yang berbasis pada pendekatan ATP dan WTP sangat penting untuk meningkatkan keterjangkauan, pemerataan akses, dan efektivitas kebijakan tarif pemerintah di sektor penerbangan.

Pada penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data berupa kuisioner yang diisi sejumlah 30 taruna/i Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yang berasal dari Bali dan secara rutin menggunakan transportasi udara pada rute Jakarta-Denpasar. Data yang diperoleh, sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Harga Tiket Pesawat

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden (95%) mengetahui bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengendalian harga tiket pesawat. Salah satu bentuk intervensi pemerintah tersebut adalah melalui kebijakan tarif batas atas dan batas bawah, yang ditetapkan untuk menjamin keterjangkauan dan mencegah terjadinya praktik harga yang tidak wajar di industri penerbangan.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dalam kebijakan ini, pemerintah menetapkan harga maksimum yang dapat dikenakan oleh maskapai penerbangan untuk rute-rute domestik kelas ekonomi. Tujuannya adalah agar harga tetap terjangkau oleh masyarakat dan tidak memberatkan pengguna jasa, khususnya pada momen-momen dengan lonjakan permintaan seperti libur panjang atau hari raya keagamaan.

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Mekanisme Formulasi dan Penetapan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, menjelaskan bahwa penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya operasional, daya beli masyarakat, dan tingkat pelayanan. Dengan regulasi ini, pemerintah juga mengatur mekanisme evaluasi tarif secara berkala agar tetap sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

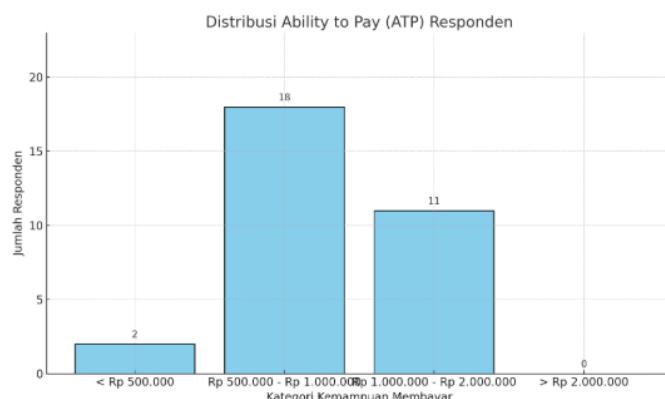
Namun demikian, 54,8% responden menyatakan bahwa harga tiket pesawat, khususnya pada periode padat penumpang (peak season), masih tergolong mahal. Beberapa di antaranya menyampaikan bahwa tarif tiket pesawat bisa mencapai Rp1.500.000 sekali jalan dari Jakarta ke Denpasar, yang dianggap memberatkan,

terutama jika frekuensi perjalanan cukup sering. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengatur batas tarif, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya dirasakan efektif oleh masyarakat. Sebagian besar responden juga menyampaikan bahwa jika pemerintah memberikan subsidi harga tiket atau insentif pajak kepada maskapai untuk rute-rute padat seperti Jakarta–Denpasar, maka frekuensi mereka dalam menggunakan pesawat akan meningkat. Dengan demikian, kebijakan harga yang efektif dan implementatif sangat penting untuk menjaga keterjangkauan, serta mendukung mobilitas masyarakat lintas pulau.

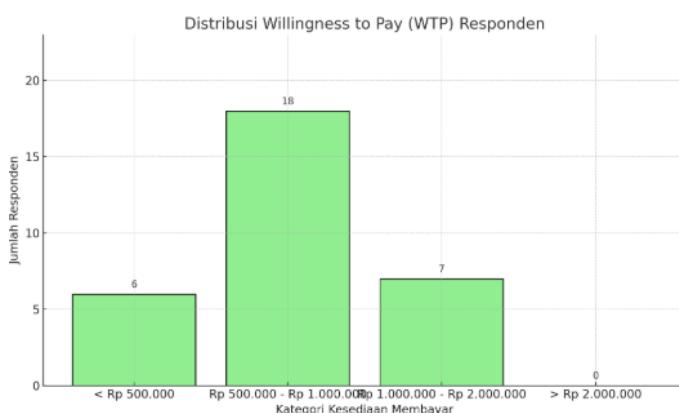
## 2. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Aspek berikutnya yang berpengaruh terhadap penggunaan transportasi udara adalah tingkat pendapatan masyarakat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sekitar 19,4% responden berasal dari keluarga dengan pendapatan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali. Kelompok ini umumnya menyatakan bahwa harga tiket pesawat dengan kisaran Rp900.000 hingga Rp1.500.000 masih dapat dijangkau, meskipun tetap perlu dilakukan perencanaan keuangan yang matang. Sementara itu, 71% responden berasal dari kelompok keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah. Responden dari kelompok ini menyatakan bahwa harga tiket pesawat sering kali menjadi pertimbangan utama dalam merencanakan perjalanan. Dalam beberapa kasus, mereka memilih moda transportasi alternatif seperti bus atau kapal laut yang lebih murah, meskipun waktu tempuhnya jauh lebih lama.

Fenomena ini sejalan dengan konsep ability to pay (kemampuan untuk membayar), di mana masyarakat hanya akan menggunakan moda transportasi tertentu apabila biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Di sisi lain, konsep willingness to pay (kesadaran untuk membayar) juga relevan, karena terdapat responden yang menyatakan bahwa mereka bersedia membayar lebih apabila pelayanan yang diberikan memadai, waktu tempuh efisien, dan jadwal penerbangan sesuai kebutuhan akademik maupun keluarga.



Gambar 1 1 Ability To Pay



Gambar 1 2 Willingness To Pay

### 3. Jumlah Pengguna Transportasi Udara

Dari hasil kuesioner, sebanyak 60,7% responden menyatakan menggunakan transportasi udara untuk rute Jakarta–Bali minimal dua kali dalam satu tahun akademik, seperti saat libur semester atau libur nasional. Bahkan, 78,6% di antaranya menggunakan pesawat lebih dari tiga kali dalam satu tahun, baik untuk kebutuhan pribadi maupun keperluan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga tiket sering dianggap tinggi, transportasi udara tetap menjadi pilihan utama karena menawarkan kecepatan dan kenyamanan yang tidak dimiliki oleh moda transportasi lain. Dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta ke Denpasar, pesawat menjadi solusi praktis bagi taruna/i yang memiliki waktu terbatas atau ingin menghemat waktu perjalanan.

Secara keseluruhan, jumlah pengguna transportasi udara dipengaruhi oleh kombinasi antara kebijakan pemerintah dalam menjaga harga tiket tetap terjangkau dan kondisi ekonomi masyarakat. Ketika pemerintah berhasil menstabilkan harga tiket dan pendapatan masyarakat mencukupi, maka minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara pun cenderung meningkat.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan harga tiket pesawat dan hubungannya dengan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menggunakan transportasi udara. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner dari 30 taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug asal Bali, diperoleh beberapa simpulan penting sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden memahami bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengendalian tarif angkutan udara, khususnya melalui kebijakan batas atas dan batas bawah tarif sebagaimana diatur dalam KM 106 Tahun 2019 dan PM 20 Tahun 2019. Meskipun regulasi tersebut telah dilaksanakan, namun masih terdapat persepsi di kalangan pengguna bahwa harga tiket, khususnya pada periode puncak perjalanan, masih relatif mahal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan regulasi di lapangan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
2. Tingkat pendapatan berperan penting dalam keputusan penggunaan transportasi udara. Responden dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah mengakui bahwa harga tiket menjadi faktor utama dalam menentukan frekuensi perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ability to pay (ATP) menjadi indikator penting dalam menjelaskan perilaku pengguna transportasi udara. Namun demikian, ada juga sebagian responden yang bersedia membayar lebih (willingness to pay/WTP) apabila kualitas pelayanan ditingkatkan, seperti ketepatan waktu, kenyamanan, dan fleksibilitas jadwal.
3. Meskipun harga tiket masih dirasa tinggi, transportasi udara tetap menjadi pilihan utama bagi mayoritas responden karena efisiensi waktu dan kemudahan akses. Lebih dari 60% responden menggunakan moda ini minimal dua kali dalam setahun, dan hampir 80% menggunakan lebih dari tiga kali. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang tepat, didukung oleh pendapatan masyarakat yang memadai, mampu mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi udara.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara regulasi pemerintah, daya beli masyarakat (ATP), dan kemauan untuk membayar (WTP) berperan penting dalam menentukan volume pengguna transportasi udara. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan tarif yang lebih adaptif, evaluasi reguler terhadap harga tiket, serta pemberian insentif atau subsidi pada rute-rute padat atau yang memiliki urgensi sosial tinggi, guna meningkatkan aksesibilitas layanan penerbangan di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai kemampuan membayar (ATP) masyarakat umumnya lebih tinggi dari kemauan membayar (WTP), yang mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat mampu, mereka belum tentu bersedia membayar tarif tinggi tanpa peningkatan kualitas layanan. Hal ini menjadi tantangan bagi efektivitas regulasi pemerintah dalam pengendalian harga tiket pesawat, terutama pada rute-rute strategis seperti Jakarta–Denpasar. Meskipun kebijakan tarif batas atas dan bawah telah diterapkan melalui KM 106 Tahun 2019 dan PM 20 Tahun 2019, hasil survei menunjukkan bahwa harga tiket pada masa padat

penumpang masih dianggap mahal oleh sebagian besar responden. Ketidaksesuaian antara regulasi tarif dan daya beli masyarakat ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data ATP-WTP, termasuk subsidi pada rute tertentu, guna memastikan aksesibilitas transportasi udara yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indira Akmalia Hendri, "Evaluasi Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024 oleh Prof. Tatacpta Dirgantara: Kemajuan dan Tantangan dalam Pembangunan Transportasi Udara Indonesia," Institut Teknologi Bandung, Oct. 29, 2024. Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://itb.ac.id/news/read/61591/home/evaluasi-capaian-sektor-transportasi-udara-2015-2024-oleh-prof-tatacpta-dirgantara-kemajuan-dan-tantangan-dalam-pembangunan-transportasi-udara-indonesia>
- Arza Prameswara, "LM FEB UI: Kemampuan & Kemauan Masyarakat Membeli Tiket Pesawat Masih Aman," Universitas Indonesia, 2024. Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://www.ui.ac.id/lm-feb-ui-kemampuan-kemauan-masyarakat-membeli-tiket-pesawat-masih-aman>
- Ihya Ulum Aldin, "Riset UI: Kemampuan Masyarakat Beli Tiket Pesawat Maksimal Rp 1,5 Juta," Katadata, May 29, 2019. Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://katadata.co.id/berita/transportasi/5e9a518978208/riset-ui-kemampuan-masyarakat-beli-tiket-pesawat-maksimal-rp-15-juta>
- N. I. Sukardi, A. Tata, and R. Hakim, "ANALISIS KETERJANGKAUAN DAYA BELI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UDARA UNTUK RUTE DARI KABUPATEN KEPULAUAN SULA KE KOTA TERNATE," MITSU" Media Informasi Teknik Sipil UNIJA, vol. 10, no. 2, 2022.
- P. Candra Susanto and Y. Keke, "IMPLEMENTASI REGULASI INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) PADA PENERBANGAN INDONESIA," AVIASI Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan, vol. 16, 2019.
- Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, and Anthon Fathanudien, "TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFUND TRANSPORTASI UDARA DI INDONESIA," International Journal of Frontiers in Sociology, vol. 5, no. 6, 2023, doi:
- H. Suropati, "PERAMALAN PASAR TRANSPORTASI UDARA DOMESTIK INDONESIA PASCAPANDEMI COVID-19," Jurnal Transportasi, vol. 22, no. 3, pp. 227–236, 2022.
- A. Sena and H. Prayitno, "Membangun Transformasi Digital dan Berkelanjutan Transportasi Udara Indonesia," Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, vol. 18, no. 1, p. 696, Jan. 2024, doi: 10.35931/aq.v18i1.2777.
- S. Lumban Gaol, N. Anita Sinaga, S. Zein Sgn, B. Prayitno, and A. Rosliana Dewi, "Membangun Transportasi Udara Era 5.0 di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan," vol. 7, no. 1, 2024, doi: 10.31933/unesrev.v6i4.
- MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, "KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 106 TAHUN 2019 TENTANG TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI," 2019.
- MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI. 2019.
- P. M. Kusumadewi et al., "ANALISIS STANDAR PENERBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL," 2023.
- Revy Safitri, "EVALUASI TARIF ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN ABILITY TO PAY(ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY(WTP) DI KOTA PANGKALPINANG," Jurnal Fropil, vol. 4, no. 2, 2016.
- Ira Permani, Uu Saepudin, Dedi Sutrisna, and Taufik Martha, "ANALISIS TARIF ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN, ABILITY TO PAY, DAN WILLINGNESS TO PAY," Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, vol. 1, no. 2, 2024.

- N. Fadilah, F. Lintang, Y. Kadir, and D. M. Y. Tuloli, “ANALISIS PENENTUAN TARIF BERDASARKAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN, ABILITY TO PAY DAN WILLINGNESS TO PAY TRANS BRT KORIDOR I PROVINSI GORONTALO,” vol. 1, pp. 41–48, 2021, [Online]. Available: <https://composite.ft.ung.ac.id/index.php/cj>
- S. Nadya Putri, Y. Darma, and N. Fadhly, “Analisis Tarif Pesawat Rute Banda Aceh-Jakarta Berdasarkan Total Operating Cost, Ability To Pay dan Willingness To Pay,” Journal of The Civil Engineering Student, vol. 3, no. 1, pp. 22–28, 2021.
- K. H. Putra and F. N. Azizah, “Analisis Penentuan Tarif Jasa Transportasi Udara Rute Kediri-Jakarta di Bandar Udara Kediri,” Jurnal Teknik Sipil, vol. 2, no. 1, 2021.
- Septian Aryatama, “Analisis Rencana Tarif Angkutan Umum Kereta Api Bandara Berdasarkan Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP),” Jurnal Pendidikan dan Konseling, vol. 4, no. 5, 2022.
- A. A. Zaniar, A. Y. Genovani, A. Hamdi, A. Sodikin, and N. Alfaridi, “Analysis Ability To Pay And Willingness To Pay For Low Cost Carrier (LCC) Airlines (Case Study: Flight Jakarta to Surabaya With Citilink And Sriwijaya Airlines),” GROSTLOG, 2019.
- Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan,” Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.